Journal Education and Government Wiyata ISSN 2986-5131
Volume 4 Nomor 3, Agustus 2026 (744-759)
https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/e-gov

ANOMALI PERENCANAAN EKOLOGIS: MENYELAMATKAN TARGET LINGKUNGAN ACEH TENGAH 2026

Umikalsum[1]
Bappeda Kabupaten Aceh Tengah, Indonesia[1]
E-mail: umminaqiyya@gmail.com[1]

ABSTRACT

Central Aceh Regency's macroeconomic growth of 4.98% has left behind a paradox in the form of an ecological crisis and social vulnerability. The decline of the Environmental Quality Index (IKLH) to 79.20 and the Social Integrity Index (IKS) to 77.21 is a direct consequence of the pathological practice of incremental budgeting. This study aims to diagnose the discrepancy between the ambitious targets of the Work Plan (Renja) and the disparity in the Indicative Budget Ceiling which remains trapped in routine operational spending as well as to formulate comprehensive policy options. Through an Internal-External Factor Evaluation (IFE-EFE) mapping, the regional planning architecture was identified as being in the Defensive Quadrant. A prospective policy evaluation using William Dunn's method confirms that normative interventions are no longer sufficient. Therefore, this study recommends a radical restructuring of the 2026 Indicative Budget Allocation based on Zero-Based Budgeting. This policy mandates a moratorium on non-essential bureaucratic spending to reallocate fiscal space toward emergency ecological capital expenditures, such as restoring the infrastructure capacity of Final Disposal Sites (FDS) and enforcing environmental laws. These interventions are not only aimed at technically preserving the environment's carrying capacity but also, from a humanistic perspective, seek to restore social cohesion, a culture of mutual aid, and the public's right to a healthy environment.

Keywords: *Performance-Based Budgeting, Environmental Quality Index, Social Capital, Policy Evaluation, Zero-Based Budgeting.*

ABSTRAK

Pertumbuhan ekonomi makro Kabupaten Aceh Tengah sebesar 4,98% menyisakan paradoks berupa krisis ekologis dan kerentanan sosial. Merosotnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) ke level 79,20 dan Indeks Kesalehan Sosial (IKS) menjadi 77,21 merupakan imbas langsung dari patologi penganggaran tambal sulam (incremental budgeting). Kajian ini bertujuan untuk mendiagnosis anomali antara target ambisius Rencana Kerja (Renja) dengan disparitas Pagu Indikatif yang terjebak pada belanja operasional rutin, serta merumuskan opsi kebijakan yang komprehensif. Melalui pemetaan Internal-External Factor Evaluation (IFE-EFE), arsitektur perencanaan daerah

Journal Education and Government Wiyata ISSN 2986-5131
Volume 4 Nomor 3, Agustus 2026 (744-759)
https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/e-gov

teridentifikasi berada pada Kuadran Defensif. Evaluasi kebijakan prospektif menggunakan metode William Dunn menegaskan bahwa intervensi normatif tidak lagi memadai. Oleh karena itu, kajian ini merekomendasikan restrukturisasi radikal Pagu Indikatif 2026 berbasis Zero-Based Budgeting. Kebijakan ini mewajibkan moratorium belanja birokrasi non-esensial untuk merealokasi ruang fiskal pada belanja modal ekologis darurat, seperti pemulihan kapasitas infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan penegakan hukum lingkungan. Intervensi ini tidak hanya bertujuan untuk menyelamatkan daya dukung alam secara teknis, tetapi juga secara humanis berupaya memulihkan kohesi sosial, budaya gotong royong, dan hak masyarakat atas lingkungan yang sehat.

Kata Kunci: *Penganggaran Berbasis Kinerja, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Modal Sosial, Evaluasi Kebijakan, Zero-Based Budgeting.*

PENDAHULUAN

Perencanaan Berbasis Kinerja (PBK) mensyaratkan keselarasan absolut antara alokasi anggaran dan hasil akhir yang berdampak langsung pada kesejahteraan komunal. Tata kelola birokrasi wajib mengintegrasikan efisiensi fiskal dengan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat secara substantif. Merujuk pada konsep Pembangunan Berkelanjutan, ekuilibrium antara preservasi ekologi dan konsolidasi kohesi sosial merupakan pilar fundamental.

Paradigma *Environmental Kuznets Curve* (EKC) mengartikulasikan bahwa pada fase awal eskalasi ekonomi makro, tekanan terhadap kelestarian lingkungan akan meningkat drastis akibat intensifikasi eksploitasi dan aktivitas konsumsi. Dinamika ini menuntut instrumen fiskal daerah untuk menyediakan rasio belanja modal ekologis yang proporsional guna mengimbangi eksternalitas negatif dari aktivitas perekonomian. Kegagalan memitigasi dampak turunan tersebut akan memicu kerentanan struktural yang menggerus pilar-pilar modal sosial, selaras dengan teori Robert Putnam mengenai konektivitas kausal antara himpitan ekonomi rumah tangga dengan dekadensi solidaritas serta ketertiban komunal.

Tinjauan literatur mutakhir mengidentifikasi kekosongan analitis dalam membedah relasi kausalitas antara struktur pagu indikatif dengan kemunduran indikator kesejahteraan ganda. Osborne (2023) serta Nugroho dan Riant (2023) menyoroti patologi penentuan anggaran birokrasi yang kaku. Pada spektrum lingkungan, Hadi (2023) dan Setiawan (2024) mengonfirmasi korelasi antara degradasi lahan agraris dan eskalasi friksi sosial. Literatur dari Siregar (2025), Fitriani (2025), serta Rahman (2024) terfokus pada kelemahan manajemen operasional persampahan tanpa mengelaborasi keterbatasan fiskal badan perencana daerah. Sementara itu,

kajian resolusi dinamika komunal oleh Wibowo (2025) dan Kusuma (2024) luput mengintegrasikan intervensi politik anggaran sebagai variabel penentu. Berbagai kajian dari Pratama (2023), Hakim dan Putri (2024), Siregar (2022), Yuliana dan Firmansyah (2024), Halim (2025), Anwar (2025), hingga Hasanah (2025) membuktikan kecenderungan analisis akademis yang terfragmentasi dalam batasan sektoral. Kesenjangan empiris ini mengharuskan adanya analisis terpadu yang mengevaluasi Rencana Kerja (Renja) daerah sebagai episentrum permasalahan.

Fenomena pembangunan di Kabupaten Aceh Tengah merepresentasikan anomali struktural riil. Laju pertumbuhan ekonomi mencapai 4,98% dengan PDRB per kapita menyentuh Rp 47,28 juta.

Evaluasi instansi resmi pemerintah daerah mencatatkan skor performa kinerja birokrasi bersertifikat pada level 87,56%. Capaian administratif dan ekonomi makro tersebut berbanding terbalik dengan kondisi ekologis serta sosial kemasyarakatan di lapangan.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) daerah merosot hingga ke level 79,20. Kemunduran ini direpresentasikan oleh ketidakmampuan manajemen daerah dalam mengelola lonjakan timbulan sampah perkotaan akibat stagnasi alokasi program Pengelolaan Persampahan yang tertahan pada pagu Rp 7,18 miliar. Postur anggaran tersebut terserap penuh untuk operasional rutin sehingga mengorbankan urgensi penyediaan infrastruktur ekologis dasar, yang berimbas pada jatuhnya Indeks Pembangunan Infrastruktur Dasar ke level 68,11. Degradasi daya dukung fisik tersebut merambat secara simultan pada kemerosotan Indeks Kesalehan Sosial (IKS) menjadi 77,21.

Tingkat kerentanan ini didorong oleh himpitan beban ekonomi masyarakat dengan rasio Gini mencapai 0,332 dan 57,59% total pengeluaran per kapita tersedot murni untuk pemenuhan konsumsi pangan. Struktur fundamental ini memperparah paradoks ketenagakerjaan daerah, di mana sektor primer pertanian yang menguasai 61,21% serapan tenaga kerja gagal mengakomodasi luapan pengangguran kelompok terdidik akibat lambatnya transisi menuju agroindustri berkelanjutan.

Pemeriksaan terhadap rangkaian anomali perencanaan tersebut menghasilkan tiga masalah esensial yang kemudian dievaluasi menggunakan metode matriks *Urgency, Seriousness, dan Growth* (USG). Penilaian pembobotan dilakukan pada rentang skala satu hingga lima untuk mendiagnosis tingkat kedaruratan isu dan menetapkan prioritas intervensi kebijakan tata kelola daerah.

Journal Education and Government Wiyata ISSN 2986-5131
Volume 4 Nomor 3, Agustus 2026 (744-759)
https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/e-gov

Tabel. 1 Matriks Penilaian USG

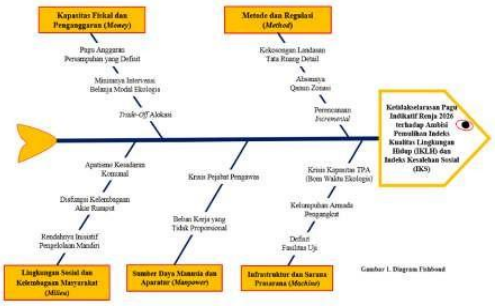
No	Isu Strategis (Identifikasi Masalah)	U	S	G	Total Skor	Prioritas
1	Ketidakselarasan Pagu Indikatif dengan Target Pemulihan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	5	5	5	15	I
2	Dekadensi Kohesi Sosial (IKS) Akibat Kerentanan Ekonomi Rumah Tangga	4	4	4	12	II
3	Kesenjangan Pembangunan Infrastruktur Dasar Terhadap Daya Dukung Permukiman	4	3	4	11	III

Sumber: Olahan Data Primer, 2026.

Hasil matriks USG menetapkan ketidakselarasan Pagu Indikatif terhadap target pemulihan IKLH sebagai prioritas absolut penyelesaian. Akar permasalahan struktural ini dibedah lebih jauh melalui instrumen diagnostik *Fishbone Diagram* yang menjangkau lima dimensi krusial birokrasi. Pada dimensi regulasi (*Method*), instansi pengawasan mengalami kelumpuhan operasional akibat ketiadaan instrumen Rencana Detail Tata Ruang Wilayah (RDTRW) serta Qanun Zonasi.

Dimensi penganggaran (*Money*) me ngonfirmasi berjalannya praktik *incremen tal budgeting*, terbukti dari alokasi belanja modal ekologis darurat yang hanya disetujui sebesar Rp 1,61 miliar. Kegagalan alokasi ini secara langsung menghancurkan kapasitas dimensi infrastruktur (*Machine*), di mana Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah mengalami kondisi *overcapacity* kronis yang diiringi oleh defisit armada pengangkut maupun ketiadaan peralatan laboratorium uji lingkungan. Kelemahan teknis tersebut diperburuk oleh dimensi sumber daya aparatur (*Manpower*) berupa krisis ketersediaan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) untuk menjamin penegakan hukum tata ruang. Rentetan defisit pada empat dimensi ini memicu resiliensi sosial yang rapuh pada dimensi kelembagaan komunal (*Milieu*), bermani festasi pada sikap apatisme warga dan hilangnya fungsi aparatur pemerintah kampung dalam mengendalikan volume limbah rumah tangga secara mandiri.

Gambar. 1 Diagram Fishbone Akar Masalah
Perencanaan Ekologis



Sumber: Olahan Data Primer, 2026.

Pembuktian kuantitatif atas kegagalan sistemik tersebut diuji menggunakan pemetaan evaluasi faktor strategis *Internal Factor Evaluation* (IFE) dan *External*

Factor Evaluation (EFE) dalam rumusan analisis SWOT. Hasil kalkulasi mengha silkan defisit skor sumbu absis sebesar -0,20 (selisih kelemahan yang mendominasi kekuatan internal) serta defisit skor sumbu ordinat sebesar -0,15 (selisih ancaman yang melampaui peluang

eksternal). Persilangan titik koordinat (-0,20 ; -0,15) menempatkan arsitektur perencanaan daerah secara absolut berada pada Kuadran IV (Kuadran Defen sif). Posisi ini memvalidasi berlakunya fase kedaruratan fiskal, di mana kelemahan struktural birokrasi terakumulasi bersamaan dengan tekanan ancaman eksternal yang eksponensial.

Mode perencanaan inkremen tal dinyatakan gagal secara matematis dan mendesak perumus kebijakan untuk segera menetapkan strategi putar haluan (*turn around strategy*). Pemerintah daerah terikat pada kewajiban untuk mengeksekusi moratorium belanja operasional non-esensial dan mengalihkan ruang fiskal tersebut menjadi injeksi belanja modal fisik guna menyelamatkan fungsi infrastruktur ekologis secara instan.

Diagnosis komprehensif dari seluruh variabel di atas memformulasikan rumusan masalah utama dalam artikel ini, yakni terjadinya diskoneksi struktural antara ambisi Rencana Kerja daerah dalam memulihkan Indeks Kualitas Lingku ngan Hidup dan Indeks Kesalehan Sosial dengan alokasi penetapan Pagu Indikatif yang tidak rasional, sehingga memicu kelumpuhan daya dukung ekologis dan eskalasi kerentanan kohesi sosial komunal di Kabupaten Aceh Tengah. Kajian ini memiliki tujuan utama untuk mengurai anomali pengalokasian anggaran tersebut dan merumuskan intervensi kebi jakan strategis berbasis *Zero-Based Budge ting* yang terukur guna mengembalikan tata kelola perencanaan daerah pada rel keberlanjutan yang rasional dan humanis.

KAJIAN PUSTAKA

Penganggaran Berbasis Kinerja meru pakan kerangka utama dalam manajemen keuangan sektor publik yang mensyaratkan adanya tautan logis antara alokasi dana dengan hasil akhir pembangunan. Konsep ini mewajibkan setiap formulasi Rencana Kerja memiliki landasan rasional yang terukur untuk menjamin akuntabilitas kiner ja daerah. Realitas tata kelola birokrasi sering kali terjebak pada patologi peng anggaran inkremental, sebuah mekanisme perencanaan yang menetapkan pagu indi katif berdasarkan realisasi tahun sebelum nya tanpa melalui evaluasi kebutuhan faktual secara komprehensif.

Osborne (2023) menegaskan bahwa perumusan ang garan birokrasi tidak boleh mengorbankan kesejahteraan substantif demi mengejar efisiensi fiskal semata. Praktik inkremental ini menciptakan rigiditas perencanaan, memicu diskoneksi antara target makro dan dukungan operasional, serta melumpuhkan daya respons pemerintah daerah dalam memitigasi krisis lingkungan.

Nugroho dan Riant (2023) beserta Abdullah (2024) menemukan

bahwa kegagalan perumusan pagu yang adaptif bermuara pada disorien tasi kebijakan, di mana dokumen peren canaan menetapkan ambisi capaian tinggi tanpa ditopang oleh tuas fiskal yang memadai. Hakim dan Putri (2024) turut membuktikan bahwa mekanisme pengang garan tambal sulam membuat institusi publik kehilangan kelincahan strategis dalam merespons dinamika sosial masyarakat.

Paradoks pembangunan regional memanifestasikan benturan antara aksele rasi pertumbuhan ekonomi makro dan pelestarian daya dukung lingkungan. Arsi tektur pembangunan berkelanjutan menun tut proteksi absolut terhadap ekosistem sebagai penopang utama aktivitas sektoral.

Hadi (2023) memaparkan bahwa daerah berbasis agraris cenderung memacu eksploitasi lahan untuk mendongkrak angka pertumbuhan domestik dalam jangka pen dek. Akselerasi tersebut secara empiris mela hirkan eksternalitas negatif berupa eskalasi volume limbah perkotaan dan degradasi tata ruang permukiman.

Fitriani (2025) dan Rahman (2024) mengidentifikasi bahwa tekanan ekologis ini bersumber dari kelemahan sinkronisasi antara ekspansi aktivitas ekonomi dan penyediaan infrastruktur pem rosesan akhir yang rasional. Setiawan (2024) membuktikan kegagalan mitigasi dampak turunan kelestarian alam ini selalu beresiko memperluas skala kerusakan fisik menjadi kerentanan sosial komunal. Siregar (2025) menggarisbawahi bahwa diskursus keberlanjutan akan tereduksi menjadi reto rika administratif apabila instrumen Ang garan Pendapatan dan Belanja Daerah gagal mengalokasikan porsi belanja modal eko logis yang proporsional guna merevitalisasi fasilitas dasar.

Dekadensi mutu infrastruktur fisik dan ekologi memiliki korelasi kausalitas yang kuat dengan pengikisan tingkat kohesi solidaritas masyarakat. Modal sosial yang bertumpu pada rasa saling percaya, budaya gotong royong, dan ketertiban umum sangat rentan mengalami disfungsi akibat himpitan struktural ekonomi.

Wibowo (2025) mene gaskan bahwa kemerosotan Indeks Kesa lehan Sosial merupakan manifestasi lang sung dari akumulasi stresor ekonomi di ting kat rumah tangga. Ketimpangan sirkulasi kekayaan serta tingginya rasio pengeluaran konsumsi pangan memaksa masyarakat berfokus murni pada pemenuhan kebutuhan subsisten, sehingga menggerus inisiatif partisipatif warga dalam mengelola krisis lingkungan secara mandiri.

Kusuma (2024) menemukan bahwa dinamika kerentanan ekonomi kelas bawah ini memicu polarisasi serta meningkatkan probabilitas gesekan sosial di akar rumput. Anwar (2025) mere komendasikan intervensi kebijakan publik yang terintegrasi, di

mana instrumen fiskal tidak hanya difokuskan pada pembangunan aset fisik, melainkan wajib diorkestrasikan untuk mendanai program pemberdayaan ekonomi guna merekonstruksi ketahanan modal sosial warga yang terdampak.

Resolusi atas anomali perencanaan menuntut eksekusi rekayasa kebijakan yang menyeluruh melalui pendekatan evaluasi prospektif. Kesenjangan kronis antara target kinerja ekologis dan realitas alokasi pagu indikatif memerlukan pergeseran metode dari rutinitas inkremental menuju sistem *zero-based budgeting*.

Pratama (2023) mengarahkan badan perencana daerah untuk menyelaraskan kembali arsitektur postur anggaran agar merepresentasikan skala prio ritas pemulihan secara faktual.

Rekalibrasi instrumen finansial ini mensyaratkan peng hentian alokasi pada pos pengeluaran biro krasi non-esensial dan memindahkan ruang fiskal tersebut menjadi investasi belanja modal lingkungan berskala darurat. Sintesis antara landasan teori kinerja anggaran, mitigasi ekologis, dan restorasi modal sosial memformulasikan pijakan analitis yang tajam untuk merombak Rencana Kerja peme rintah daerah.

Transformasi tata kelola ini menjamin instrumen perumusan kebijakan kembali berorientasi pada penyelesaian masalah yang rasional, empiris, serta menge depankan aspek humanis bagi kesejahteraan komunal.

METODE

Penelitian ini menerapkan desain inkuiri kualitatif melalui pendekatan studi kasus tunggal untuk membedah anomali struktural pada perumusan kebijakan angga ran daerah. Pendekatan kualitatif dipilih guna mengeksplorasi secara mendalam tarik-menarik kepentingan birokrasi yang memicu diskoneksi antara penetapan target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Indeks Kesalehan Sosial dengan penentuan pagu indikatif Rencana Kerja Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2026. Data penelitian terdiri atas data primer berupa tinjauan hambatan operasional perumus kebijakan serta data sekunder berupa capaian indikator makro sektoral.

Prosedur pengumpulan data bersandar pada teknik triangulasi. Data primer digali melalui wawancara mendalam terhadap lima puluh orang informan kunci. Penentuan informan menggunakan teknik penarikan sampel bertujuan atau *purposive sampling* yang melibatkan anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah, pejabat Dinas Lingku ngan Hidup, legislator, akademisi, dan repre sentasi aparatur desa hingga mencapai tahap saturasi data. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui telaah dokumen resmi pemerintah daerah, meliputi Laporan Kiner ja Pemerintah

Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2024, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024, dan publikasi statistik sektoral Badan Pusat Statistik.

Prosedur teknik analisis data menggu nakan kerangka evaluasi perencanaan stra tegis melalui instrumen pemetaan *Strengths, Weaknesses, Opportunities,* dan *Threats*. Korpus data kualitatif dikuantifikasi ke dalam matriks *Internal Factor Evaluation* dan *External Factor Evaluation* untuk menentukan titik koordinat posisi arsitektur birokrasi daerah. Diagnosis posisi kuadran tersebut diturunkan menjadi ragam alternatif kebijakan menggunakan matriks TOWS. Pemilihan rekomendasi kebijakan final dievaluasi secara prospektif menggunakan enam kriteria evaluasi kebijakan publik William Dunn yang mencakup efektivitas, efisiensi, kecukupan, kemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk merumuskan strategi redesain Pagu Indikatif Renja 2026 yang implemen tatif, diperlukan pemetaan analitis yang membedah kapasitas internal birokrasi (*sup ply side*) dengan tantangan lingkungan eksternal (*demand side*). Berikut adalah identifikasi faktor strategis (Internal dan Eks ternal) yang akan menjadi basis formulasi Matriks SWOT pada Bab selanjutnya:

A. Faktor Internal (Kondisi Organisasi dan Kapasitas Daerah)

Faktor ini melihat ke dalam (*inward-looking*) terkait elemen *Money, Method, Machine*, dan *Manpower* dalam birokrasi Pemkab Aceh Tengah.

a) Kekuatan (Strengths - S):

1. Tersedianya kerangka kelembaga an lokal berupa Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2018 yang dapat dijadikan landasan yurisdiksi desentralisasi pengelo laan lingkungan ke tingkat desa.
2. Proses penyusunan RKPD dan Ren ja yang telah berjalan secara rutin dan terstruktur, memberikan ruang (momentum) yang sah bagi TAPD untuk melakukan revisi dan realo kasi pagu anggaran tahun 2026.

b) Kelemahan (Weaknesses - W):

1. Disparitas struktural Pagu Indika tif; di mana belanja operasional persampahan (Rp 7,18 miliar) tidak berimbang dengan minimnya inter vensi belanja modal ekologis (Rp 1,61 miliar).
2. Kapasitas infrastruktur utama telah melampaui batas (*overcapacity* TP A, defisit armada pengangkut, dan minimnya alat uji laboratorium).
3. Kekosongan/krisis Sumber Daya Manusia (SDM) spesifik, yakni Pe jabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH), yang melumpuhkan pene gakan aturan.
4. Absennya instrumen legal turunan

berupa Rencana Detail Tata Ruang Wilayah (RDTRW) dan Qanun Zonasi.

B. Faktor Eksternal (Dinamika Demografi, Sosial, dan Ekonomi)

Faktor ini melihat keluar (*outward-looking*) terkait dengan elemen *Milieu* (Lingkungan Sosial) dan tren indikator makro di luar kendali langsung instansi.

a) Peluang (Opportunities - O):

1. Pertumbuhan ekonomi daerah yang positif (4,98%) dan peningkatan PDRB per kapita (Rp 47,28 juta) yang berpotensi menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) ba ru jika instrumen retribusi persam pahan dan lingkungan dioptimal kan.
2. Tingginya ketersediaan tenaga kerja terdidik (Lulusan SMA 81,82% dan Sarjana 18,18% dari total pencari kerja) yang dapat dilibatkan dan diberdayakan dalam skema ekonomi sirkular atau manajemen persampahan modern (bank sampah/inovasi teknologi).

b) Ancaman (Threats - T):

1. Pertumbuhan volume timbulan sampah perkotaan yang eksponensial akibat masifnya urbanisasi dan pergerakan aktivitas ekonomi, mempercepat ledakan "Bom Waktu TPA".
2. Kerentanan ekonomi masyarakat (57,59% pengeluaran terkuras untuk makanan) yang berkolerasi dengan melebarnya ketimpangan (Indeks Gini 0,332).
3. Dekadensi modal sosial; tercermin dari merosotnya Indeks Kesalehan Sosial (IKS) menjadi 77,21 yang memicu apatisme warga terhadap inisiatif pelestarian lingkungan komunal.

Pemetaan faktor internal dan eksternal ini membuktikan bahwa Pemerintah Kabu paten Aceh Tengah tidak bisa lagi meng gunakan cara-cara *business-as-usual*. Inter vensi silang (*cross-cutting intervention*) yang akan diturunkan melalui Matriks Strategi SWOT pada bagian selanjutnya harus mampu mengonversi pertumbuhan ekonomi (O) untuk membiayai pemulihan infrastruktur ekologis (W), sekaligus menggunakan instrumen regulasi (S) untuk memitigasi apatisme sosial (T).

Pemetaan Faktor Internal dan Eksternal

Diagnosis awal atas kegagalan perencanaan daerah membutuhkan identifikasi faktor strategis yang membedah kapasitas internal birokrasi dan tekanan lingkungan eksternal. Temuan kajian menunjukkan bahwa kapasitas internal institusi perencana memiliki kekuatan berupa landasan yurisdiksi desentralisasi pengelolaan lingkungan ke tingkat desa melalui Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2018 serta adanya siklus penyusunan Renja yang terstruktur. Kekuatan ini berbenturan dengan kelemahan internal struktural yang sangat dominan, yakni disparitas

alokasi pagu indikatif, di mana program persampahan hanya menyerap anggaran operasional sebesar Rp 7,18 miliar dibandingkan dengan belanja modal ekologis yang minim pada angka Rp 1,61 miliar. Kelemahan fiskal ini berimbas pada kelumpuhan operasional berupa ketiadaan armada pengangkut yang memadai, keterbatasan alat uji laboratorium, kelebihan kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), hingga krisis ketersediaan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) untuk menjamin penegakan aturan tata ruang.

Pada dimensi eksternal, pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 4,98% dengan Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita menjadi Rp 47,28 juta serta melimpahnya angkatan kerja terdidik merupakan peluang potensial untuk pengembangan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru melalui retribusi lingkungan progresif.

Dinamika ekonomi ini sayangnya melahirkan eksternalitas negatif berupa ancaman lonjakan volume timbulan sampah perkotaan secara eksponensial. Tekanan ekologis tersebut diperparah oleh ancaman kerentanan daya beli masyarakat, yang direpresentasikan oleh 57,59% total pengeluaran per kapita tersedot untuk konsumsi pangan dasar, sehingga memicu dekadensi kohesi komunal dan menjatuhkan Indeks Kesalehan Sosial (IKS) ke level 77,21.

Secara teoretis, temuan ini mengonfirmasi postulat *Environmental Kuznets Curve*, di mana pertumbuhan ekonomi tanpa intervensi regulasi tata ruang yang humanis akan selalu mengorbankan daya dukung ekologis dan mengikis ketahanan modal sosial warga. Kondisi ini membuktikan bahwa perumusan anggaran berbasis inkremental pada periode sebelumnya lebih rentan menghasilkan bias perencanaan dibandingkan sistem penganggaran berbasis kinerja murni.

Evaluasi Faktor Internal (IFE) dan Eksternal (EFE)

Kuantifikasi bobot dan peringkat atas faktor strategis internal maupun eksternal membuktikan terjadinya defisit kapasitas institusional dalam merespons turbulensi indikator makro.

Tabel. 1 Matriks Evaluasi Faktor Internal (IFE)

Faktor Strategis Internal	Bobot	Peringkat	Skor
Kekuatan (Strengths)			
S1. Eksistensi Qanun Kab. Aceh Tengah No. 1/2018 sebagai landasan legal desentralisasi pengelolaan lingkungan ke tingkat desa.	0,15	3	0,45
S2. Siklus penyusunan RKPD dan Renja yang terstruktur.	0,10	4	0,40
Kelemahan (Weaknesses)			
W1. Disparitas struktural Pagu Indikatif (Belanja operasional Rp 7,18 miliar berbanding belanja modal ekologis Rp 1,61 miliar).	0,25	1	0,25
W2. Kelebihan kapasitas daya tampung TPA, defisit armada pengangkut, dan minimnya alat uji laboratorium lingkungan.	0,20	1	0,20
W3. Kekosongan SDM Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) yang melumpuhkan penegakan aturan.	0,15	2	0,30
W4. Ketiadaan instrumen legal turunan berupa Rencana Detail Tata Ruang Wilayah (RDTRW) dan Qanun Zonasi.	0,15	2	0,30
Total Skor IFE	**1,00**		**1,90**

Sumber: Olahan Data Primer, 2026.

Journal Education and Government Wiyata ISSN 2986-5131
Volume 4 Nomor 3, Agustus 2026 (744-759)
https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/e-gov

Tabel. 2 Matriks Evaluasi Faktor Eksternal (EFE)

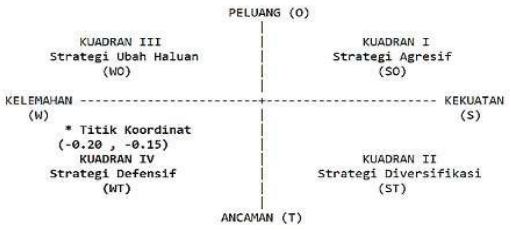
Faktor Strategis Eksternal	Bobot	Peringkat	Skor
Peluang (Opportunities)			
O1. Tren pertumbuhan ekonomi positif (4,98%) dan peningkatan PDRB per kapita sebagai potensi sumber PAD baru.	0,20	2	0,40
O2. Tingginya ketersediaan tenaga kerja terdidik (Lulusan SMA 81,82%, Sarjana 18,18%) untuk pemberdayaan ekonomi sirkular.	0,15	2	0,30
Ancaman (Threats)			
T1. Pertumbuhan eksponensial volume timbulan sampah perkotaan akibat dinamika demografi dan aktivitas ekonomi.	0,25	1	0,25
T2. Dekadensi kohesi dan modal sosial yang terefleksi dari anjloknya Indeks Kesalehan Sosial (IKS) menjadi 77,21.	0,20	1	0,20
T3. Kerentanan daya beli masyarakat (57,59% pengeluaran untuk makanan) dan eskalasi ketimpangan (Indeks Gini 0,332).	0,20	2	0,40
Total Skor EFE	**1,00**		**1,55**

Sumber: Olahan Data Kualitatif, 2026.

Skor total IFE berada pada angka 1,90 dan skor EFE menyentuh angka 1,55. Nilai yang berada jauh di bawah ambang ekuilibrium moderat 2,50 ini merupakan temuan absolut yang mengindikasikan bahwa arsitektur birokrasi daerah mengalami kelumpuhan fungsional. Pemberian bobot tertinggi dengan peringkat terendah pada kelemahan disparitas pagu indikatif membuktikan bahwa krisis lingkungan di daerah tersebut merupakan produk kegagalan manajerial alokasi fiskal, bukan sekadar imbas geografis alamiah. Realitas ini memberikan prespektif saintifik baru yang menyanggah temuan penelitian terdahulu di mana evaluasi kebijakan publikacap kali hanya berkutat pada realisasi penyerapan administratif tanpa mengukur dampak destruktif dari minimnya proporsi belanja modal pada sektor pengungkit.

Diagnosis Kuadran Strategis SWOT

Kalkulasi selisih dari nilai internal dan eksternal mengarahkan posisi institusi pada satu kuadran definitif. Perhitungan sumbu X didapatkan dari pengurangan total kekuatan terhadap kelemahan (0,85 dikurangi 1,05) yang menghasilkan angka -0,20. Perhitungan sumbu Y diperoleh dari pengurangan total peluang terhadap ancaman (0,70 dikurangi 0,85) yang menghasilkan angka -0,15. Persilangan titik koordinat (-0,20 ; -0,15) menjustifikasi posisi birokrasi perencana secara presisi.



Gambar 1. Matriks Kuadran SWOT Arsitektur Perencanaan Dan Penganggaran Kabupaten Aceh Tengah

Sumber: Olahan Data, 2026.

Pemetaan ini membuktikan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah terjebak pada Kuadran IV atau Kuadran Defensif. Temuan posisi matematis pada area defisit ini menolak justifikasi yang menganggap instansi mampu mencapai kemajuan substantif hanya dengan mere plikasi dokumen Rencana Kerja periode sebelumnya. Organisasi berada dalam fase penyelamatan darurat, menghadapi kelema han internal masif berupa kelumpuhan fiskal serta gempuran ancaman eksternal berupa degradasi sosial dan ledakan limbah. Eva luasi strategis memandatkan implemen tasi kebijakan pengendalian kerusakan melalui pemangkasan birokrasi non-esensial secara ekstrem agar ketersediaan sumber daya dapat difokuskan murni untuk menekan laju ancaman.

Formulasi Strategi Melalui Matriks TOWS

Konstruksi arsitektur perumusan kebijakan baru memerlukan persilangan faktor strategis untuk merancang rekayasa anggaran yang terukur.

Tabel. 3 Formulasi Matriks Strategi TOWS

Faktor Eksternal dan Internal	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
Peluang (O)	STRATEGI S-O (Agresif) Optimalisasi siklus penyusunan Renja 2026 untuk merancang program padat karya ekono mi hijau berbasis bank sampah komu nal guna menyerap luapan tenaga kerja terdidik daerah.	STRATEGI W-O (Stabilisasi) Pemanfaatan trajektori pertum buhan ekonomi untuk mengek straksi sumber retribusi progresif baru dalam upaya menutupi dispari tas anggaran pemulihan TPA.
Ancaman (T)	STRATEGI S-T (Diversifikasi) Penegakan mandat Qanun No. 1/2018 untuk mewajibkan sinkronisasi Anggaran Dana Desa terhadap penanganan limbah dari hulu guna meredam laju apatisme warga.	STRATEGI W-T (Defensif) Moratorium belan ja operasional non-esensial dan pengalihan 100% ruang fiskal ter sebut untuk injek si infrastruktur ekologis darurat guna merevitalisa si skor IKLH.

Sumber: Olahan Data, 2026.

Diagnosis kuadran defensif mewajibkan perumus kebijakan memprioritaskan Strategi W-T. Target utamanya adalah merestrukturisasi nomenklatur APBD dengan pendekatan *Zero-Based Budgeting*.

Penghentian pembiayaan perjalanan dinas dan rutinitas seremonial harus direalokasikan penuh untuk menutupi kelemahan mendasar berupa transisi fasilitas TPA menuju sistem *sanitary landfill* dan rekrutmen Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.

Strategi ini memiliki urgensi paling tinggi dibandingkan skema pemberdayaan ekonomi sirkular (Strategi W-O) atau desentralisasi fiskal desa (Strategi S-T) karena menjawab langsung kelumpuhan daya

dukung fisik daerah.

Komparasi dan Penilaian Alternatif Kebijakan

Tiga rancangan alternatif kebijakan diturunkan dari Matriks TOWS untuk menjalani uji kelayakan presisi sebelum ditetapkan sebagai rekomendasi definitif.

Alternatif 1 menawarkan restrukturisasi radikal pagu indikatif ekologis berbasis *Zero-Based Budgeting*. **Alternatif 2** mendesain integrasi pendanaan ekonomi sirkular melalui stimulus pembangunan bank sampah komersial. **Alternatif 3** memformulasikan regulasi diversifikasi beban pengelolaan limbah kepada pemerintah kampung melalui mandat pemotongan spesifik Anggaran Dana Desa.

Persamaan dan Perbedaan Alternatif

a) **Persamaan:** Ketiga alternatif ini memiliki paradigma yang sama: menolak sistem *incremental budgeting* (penganggaran tambal sulam). Ketiganya sepakat bahwa *business-as-usual* telah gagal total dan memfokuskan intervensi pada pemulihan kolaboratif antara ekologi (IKLH) dan kohesi sosial (IKS).

b) **Perbedaan:** Perbedaan mendasar terletak pada instrumen intervensi dan sumber dayanya. **Alternatif 1** berfokus pada intervensi hulu berupa rekayasa makro APBD oleh TAPD (Fiskal-Sentris). **Alternatif 2** berfokus pada intervensi ekonomi-sosial dengan target kelompok rentan dan pengangguran terdidik (Pasar-Sentris). Sementara **Alternatif 3** bertumpu pada intervensi regulasi dan desentralisasi fiskal ke Pemerintah Kampung (Regulasi-Sentris). Penilaian atas ketiga opsi ini dijalankan menggunakan enam kriteria evaluasi prospektif William Dunn yang menyajikan justifikasi kualitatif mendalam pada setiap penilaian numeriknya.

Tabel. 4 Penilaian Alternatif Kebijakan Berdasarkan Kriteria William Dunn

Kriteria Penilaian	Alternatif 1: Restrukturisasi Pagu Indikatif	Alternatif 2: Ekonomi Sirkular	Alternatif 3: Diversifikasi Regulasi Desa
Efektivitas	Skor 5: Sangat efektif. Langsung mengintervensi akar masalah fisik infrastruktur TPA dengan suntikan belanja modal. Laju degradasi IKLH dapat segera dihentikan secara empiris melalui pembangunan fisik.	Skor 3: Kurang efektif untuk intervensi jangka pendek. Perubahan perilaku masyarakat dan edukasi pasar memakan waktu lama sebelum berdampak signifikan pada penurunan sampah di TPA.	Skor 4: Efektif memotong volume limbah dari hulu desa. Namun, capaiannya bergantung mutlak pada disparitas kapasitas manajerial tiap aparatur kampung.
Efisiensi	Skor 4: Sangat efisien secara regulasi. Hanya menuang kan serta merealokasi pagu belanja non-esensial yang telah tersedia distruktur APBD tanpa menunggu Pembuatan aturan baru.	Skor 2: Efisiensi rendah. Membutuhkan upaya administratif dan biaya ekstra untuk pelatihan teknis,penyediaan modal awal,serta proses pendampingan kelembagaan.	Skor 4: Sangat efisien bagi Fiskal kabupaten Karena mentransfer Beban operasional harian ke Anggaran Dana Desa, membebask an tekanan APBD daera h.
Kecukupan	Skor 5: Sangat cukup. Menuntaskan anomali Struktural antara target Ambisius IKLH dan rendahnya dukungan pagu secara komprehensif pada skala makro kebijakan daerah.	Skor 3: Sedang. Mampu Mengurangi sebagian Tinekat penzenzeguran, namun volumenya tidak memadai untuk memuntaskan krisis daya tampung TPA yang membutuhkan injeksi alat berat.	Skor 3: Sedang. Menyelesai kanproblematika di akar rumput, akan tetapi tantangan pengolahan hilir pada fasilitas TPA tetap menjadi beban kabupaten yang belum terjawab utuh.
Kemerataan	Skor 4: Keadilan tercapai dengan mereduksi kenyamanan birokrasi struktural demi memprioritas kan kepen tingan hak asasi publik atas lingku ngan permu kiman yang sehat.	Skor 5: Sangat tinggi. Memberika n keadilan ekonomi langsung kepada kelompok rentan yang memicu resiliensi daya beli serta pemu lihan modal solidaritas sosial komu nal secara empiris.	Skor 3: Sedang. Rentan membebani prioritas Anggaran Dana Desa lain, berpotensi melahirkan ketimpang an penanga nan antar wilayah yang memi liki kapasi tas finansial berbeda.
Responsivitas	Skor 5: Sangat ting gi. Kebijakan mutlak untuk menjawab sanksi krisis lingkungan akibat implementasi sistem urug terbuka melalui percepatan pemulihan infrastruktur.	Skor 3: Sedang. Mekanisme ekonomi sirkular tergolong respons pa sif yang ti dak relevan diimplemen tasikan se bagai penua dam krisis darurat daya dukung fisik.	Skor 4: Tinggi. Tanggap menyedia kan penge lolaan sampah domestik secara instan untuk mencegah akumulasi beban lingkungan pada zona perkotaan.
Ketepatan	Skor 5: Sangat tepat. Berada sepenuhnya dalam rentang otoritas legal Tim Anggaran Pemerintah Daerah guna merombak postur dokumen Rencana Kerja daerah.	Skor 3: Sedang. Membutuh kan koordi nasi lintas instansi yang rentan berujung pa da stagnasi akibat ego sektoral antar lembaga pemerin tahan terkait.	Skor 4: Tinggi. Di dukung pa yung hukum daerah yang kokoh, ken dati pelaksa naannya di lapangan sa ngat rawan bersinggung an dengan intervensi hak otonomi pemerintah kampung.
Total Skor	28	19	22

Sumber: Olahan Data, 2026.

Alternatif 1 unggul mutlak dengan perolehan skor tertinggi 28 poin. Pembuktian komparatif ini menegaskan bahwa restrukturisasi pagu indikatif melalui *Zero-Based Budgeting* adalah intervensi paling rasional, efektif, dan legal secara yurisdiksi. Berbeda dengan inisiatif desentralisasi dana desa yang rentan friksi politis otonomi, perombakan internal nomenklatur APBD berada penuh pada otorisasi pimpinan daerah untuk merealisasikan pemulihan ekologi tanpa hambatan birokratis eksternal.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan argumentasi evaluasi prospektif, penelitian ini menghasilkan rekomendasi penerbitan Instruksi Kepala Daerah tentang Moratorium Belanja Non-Esensial dan Restrukturisasi Radikal Pagu Indikatif Ekologis pada Dokumen RKPD dan Rencana Kerja Tahun 2026. Kebijakan direktif ini mewajibkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah mengunci usulan operasional seremonial minimal sebesar 30 persen dari entitas perangkat daerah non-pelayanan dasar. Ruang fiskal bernilai miliaran rupiah tersebut wajib direalokasikan menjadi instrumen belanja modal ekologis bagi Dinas Lingkungan Hidup guna mendanai pengadaan perluasan sel TPA, pemenuhan sarana laboratorium, dan pembiayaan operasional rekrutmen formasi Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup. Eksekusi nyata perombakan pagu ini akan memutus siklus kelumpuhan daya dukung alam sekaligus menghapus patologi diskoneksi struktural di dalam dokumen perumusan kebijakan anggaran pemerintahan.

KESIMPULAN

Anomali pencapaian target kinerja daerah merupakan manifestasi dari kegagalan sistemik perencanaan inkremental yang mendisrupsi ekuilibrium pembangunan secara menyeluruh. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kemerosotan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan peluruhan Indeks Kesalehan Sosial bersumber murni dari disparitas alokasi Pagu Indikatif yang tersandera pada pembiayaan rutinitas birokrasi, sehingga mengabaikan urgensi penyediaan infrastruktur ekologis berskala darurat.

Diagnosis evaluasi faktor strategis membuktikan institusi daerah berada pada kuadran defensif dan tidak memiliki kapasitas kelonggaran fiskal untuk mempertahankan mekanisme *business-as-usual*. Pemulihan daya dukung lingkungan dan kohesi sosial menuntut transformasi radikal berupa penerapan *Zero-Based Budgeting* yang diwujudkan melalui moratorium belanja operasional non-esensial perangkat daerah. Realokasi ruang fiskal menjadi instrumen investasi belanja modal fisik menggaransi terwujudnya perencanaan anggaran yang logis, adaptif terhadap krisis, serta mengutamakan pemenuhan kesejahteraan masyarakat di atas

kenyamanan administratif.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tengah. (2023). *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah 2023*. BPS Kabupaten Aceh Tengah.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tengah. (2024). *Kabupaten Aceh Tengah dalam Angka 2024*. BPS Kabupaten Aceh Tengah.

Bratakusumah, D. S., & Riyadi. (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah*. PT Gramedia Pustaka Utama.

Damanhuri, E., & Padmi, T. (2021). *Pengelolaan Sampah Terpadu*. ITB Press.

David, F. R. (2011). *Strategic Management: Concepts and Cases* (13th ed.). Prentice Hall.

Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (6th ed.). Routledge.

Fukuyama, F. (2001). Social capital, civil society and development. *Third World Quarterly*, 22(1), 7-20. https://doi.org/10.1080/713701144

Halim, A. (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik: Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah*. Salemba Empat.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah*. Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1312.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2023). *Laporan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Nasional Tahun 2023*. Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

Mahsun, M. (2019). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE.

Mardiasmo. (2021). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah* (Edisi Revisi). Andi Offset.

Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*. Addison-Wesley.

Ostrom, E. (1990). *Governing the Commons: The Evolution of*

Institutions for Collective Action. Cambridge University Press.

Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. (2018). *Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah*. Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2018 Nomor 1.

Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. Simon and Schuster.

Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah*. Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 69.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244.

Shah, A., & Shen, C. (2007). A primer on performance budgeting. Dalam A. Shah (Ed.), *Performance Accountability and Combating Corruption* (hlm. 137-178). World Bank.

Stern, D. I. (2004). The rise and fall of the environmental Kuznets curve. *World Development*, 32(8), 1419-1439. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2 004.03.004

Wildavsky, A. (1964). *The Politics of the Budgetary Process*. Little, Brown.